

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pajak merupakan salah satu sektor pendapatan yang paling besar dihasilkan dari berbagai kalangan masyarakat baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Pajak yang diterima dari masyarakat ini digunakan kembali oleh pemerintah untuk segala keperluan dan kebutuhan Negara. Disini dapat diketahui pada tahun 2016 pendapatan Negara dari sektor perpajakan sendiri mengalami kenaikan sebanyak 84,96%. Tetapi hal ini masih dapat dikatakan kurang dari target karena penetapan APBN yang diharapkan oleh pemerintah sebesar 13,11% sedangkan pada tahun 2016 tax ratio yang dapat terealisasi hanya 11% (Tahar dan Rachmawati ,2020).

Menurut Prameswari (2017) sebagai salah satu pendapatan yang besar, pajak menjadi yang hal krusial dalam hal ini adalah pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah masih belum sepenuhnya berhasil secara maksimal. Hal ini bisa dikarenakan masih banyak wajib pajak yang menganggap pajak merupakan hal yang tidak penting untuk dilaksanakan. Salah satunya bagi wajib pajak badan yaitu perusahaan menganggap bahwa pajak adalah beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena semakin besar laba yang diperoleh maka beban pajak pun akan semakin tinggi pula. Maka dari itu perusahaan pun melakukan cara agar dapat menghindari pajak yaitu melakukan tindakan agresivitas pajak. Tindakan agresivitas pajak yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan merupakan legal dan tidak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan tax avoidance (Rochmansyah dan Fitriana ,2020).

Menurut Andini dan Amboningtyas (2020) manajemen laba merupakan suatu permasalahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis biasanya masalah yang timbul berawal dari manajer dengan pemilik bisnis. Dimana keduanya memiliki kepentingan yang berbeda yaitu sebagai pemilik berkehendak untuk memiliki laba yang meningkat agar tercapainya saham yang lebih tinggi pula, sedangkan sebagai pemegang saham memiliki keyakinan bahwa harus mendapatkan kontrak yang

bernilai besar agar memperoleh kemakmuran. Untuk mencapai tujuan tersebut manajer melakukan manajemen laba salah satunya dengan melakukan tindakan agresif agar beban pajak yang dibayarkan tidak terlalu besar. Kebijakan ini dilakukan untuk menekan laba pada perusahaan sehingga dapat diperoleh penghasilan kena pajak yang nilainya kecil. Dalam pelaksanaan kebijakan ini muncul karena adanya perbedaan tujuan antara pemilik usaha dengan seorang manajer ini menimbulkan suatu perdebatan yang biasa disebut sebagai konflik keagenan.

Menurut Novitasari (2017) manajemen laba merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak. Dengan melakukan manajemen laba atau *earning management* perusahaan mampu melakukan tindakan untuk dapat memanipulasi laporan keuangan yang disampaikan kepada publik jika perusahaan sudah menganggap bahwa pajak adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi keuntungannya maka tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan akan sangat agresif dalam hal perpajakan dengan mencari celah agar pajak yang dibayarkan nilainya semakin kecil. Semakin banyak celah dalam perpajakan perusahaan juga semakin agresif dalam menurunkan pajaknya. Yang dimaksud dalam hal ini adalah manajer bisa saja menurunkan laba sehingga laporan keuangan yang disampaikan ke publik yang sebenarnya adalah tidak akurat. Sehingga tingkat agresivitas perusahaan semakin tinggi karena laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan itu nilai labanya akan turun dan beban pajak juga akan semakin kecil.

Menurut Windaswari dan Merkusiwati (2018) ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang menentukan besar atau kecilnya harta yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jika semakin tingginya asset yang dimiliki oleh perusahaan maka akan mempengaruhi dalam pembayaran pajaknya yang juga semakin meningkat. Ukuran perusahaan merupakan sebuah identitas yang dimiliki perusahaan di setiap tindakan dan kekonsistensannya dalam kegiatan perekonomian.

Sedangkan menurut Yauris dan Agoes (2019) ukuran perusahaan adalah faktor yang dapat mempengaruhi pajak yang akan dibayarkan. Tindakan agresivitas pajak pada perusahaan besar yang memiliki laba tinggi juga akan melakukan tindakan

agresivitas pajak dengan meminimalkan beban pajak. Dengan adanya teori biaya politik maka semakin besar ukuran perusahaan itu menjadi sorotan bagi pemerintah, maka tindakan agresivitas pada perusahaan tersebut menjadi semakin rendah.

Hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan agar tidak semakin bertambah maka diperlukannya pengawasan sebagai penyeimbang diantara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan agresif ini. Didalam penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari dkk (2018) menunjukkan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh antara *Good Corporate Governance* dengan proksi komisaris independen terhadap tindakan agresivitas pajak.

Menurut Gunawan (2017) untuk mengurangi permasalahan penghindaran pajak maka diperlukan *good corporate governance* yang dapat digunakan untuk meminimalisir faktor-faktor agresivitas pajak. *Good corporate governance* digunakan sebagai pemoderasi dalam penelitian ini karena merupakan sebagai pengendali dan pengawasan untuk perusahaan agar manajemen tidak melakukan tindakan pajak yang agresif. Salah satu bentuk dari *good corporate governance* adalah komisaris independen. Disini komisaris independen merupakan proksi yang dipilih oleh peneliti karena komisaris independen diperkirakan mampu mengawasi segala tindakan di dalam perusahaan agar tidak menyimpang dan tidak melanggar hukum sehingga semua laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan berkualitas dan perusahaan dapat menurunkan tindakan agresivitasnya.

Dengan adanya beberapa faktor yang telah disebutkan, maka peneliti akan meneliti apakah dengan adanya *good corporate governance* yaitu komisaris independen perusahaan masih saja melakukan tindakan penghindaran pajak secara agresif atautkah tindakan ini akan berkurang. Peneliti memilih objek penelitian pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia karena kurangnya penelitian tentang tindakan agresivitas pajak di sektor ini. Dan juga perusahaan manufaktur di sektor ini lebih banyak produknya yang digunakan oleh masyarakat. Maka potensi pertumbuhan laba masih sangat memungkinkan. Sehingga peneliti tertarik bagaimana mekanisme pengelolaan pajak yang dilakukan

perusahaan pada sektor ini. Periode penelitian ini selama tiga tahun dimulai dari 2017 hingga 2019.

Maka peneliti akan menguji apakah manajemen laba dan *firm size* pada perusahaan manufaktur sektor industri bahan pangan akan memberikan pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak dan bagaimana jika diikuti dengan adanya *good corporate governance* apakah pada perusahaan ini tata kelolanya akan semakin baik dalam penghindaran pajak dengan judul **”Pengaruh *Earning Management* Dan *Firm Size* Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Sektor Industri Barang Konsumsi (Periode 2017-2019).”**

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Apakah *earning management* berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2017-2019 ?
- 1.2.2 Apakah *firm size* berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2017-2019 ?
- 1.2.3 Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2017-2019 ?
- 1.2.4 Apakah komisaris independen memoderasi hubungan *earning management* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2017-2019 ?
- 1.2.5 Apakah komisaris independen memoderasi hubungan *firm size* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2017-2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui apakah *earning management* berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2017-2019.
- 1.3.2 Untuk mengetahui apakah *firm size* berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2017-2019.

- 1.3.3 Untuk mengetahui apakah komisaris independen berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2017-2019.
- 1.3.4 Untuk mengetahui apakah komisaris independen memoderasi hubungan *earning management* terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2017-2019.
- 1.3.5 Untuk mengetahui apakah komisaris independen memoderasi hubungan *firm size* terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2017-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan hubungan *earning management* dan *firm size* terhadap tindakan agresivitas pajak dengan *good corporate governance* sebagai variabel pemoderasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil dari penelitian ini sebagai bahan untuk memperbaiki tata kelola di perusahaan dalam melaporkan pajaknya.

1.4.2.2 Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Jika masih ada kurang lebihnya agar bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi.